

Pinggiran Yang Terpinggirkan: Keresidenan Banten Awal Abad Ke-20

Raka Prima Santosa*, Siswantari, Abdurakhman

Universitas Indonesia

Email: raka.prima21@ui.ac.id*, siswantari.hum@ui.ac.id, abdurakhman.hum@ui.ac.id

Abstract

Keywords

Banten history; colonial; marginalization

This study examines the structural marginalization of Banten Residency in the early twentieth century under Dutch colonial rule. The background of this study is based on the tendency of Banten historiography to focus more on the Sultanate period, the 1888 peasant revolt, and the 1926 communist uprising, while the broader social, economic, and political conditions of colonial Banten remain less explored. This study aims to explain why Banten, despite its geographical proximity to Batavia as the colonial center, remained economically backward, socially restless, and administratively peripheral. The research uses the historical method, consisting of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Primary sources include colonial archives, official reports, and contemporary newspapers, supported by relevant secondary literature. The findings show that Banten experienced layered marginalization caused by poor transportation access, infertile agricultural land, limited industrial development, weak health services, heavy taxation, and the colonial government's limited economic interest in the region. These conditions encouraged seasonal migration and strengthened social dissatisfaction among peasants. The discussion also reveals the important role of local elites, especially kyai and jawara, in shaping anti-colonial sentiment and resistance traditions. This study concludes that Banten was not merely a rebellious region, but a structurally marginalized territory whose social, economic, and political tensions were shaped by colonial neglect.

Abstrak

Kata kunci

Sejarah Banten; kolonial; marginalisasi

Penelitian ini membahas marginalisasi struktural Keresidenan Banten pada awal abad ke-20 di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kecenderungan historiografi Banten yang lebih banyak menyoroti masa Kesultanan Banten, Pemberontakan Petani 1888, dan Pemberontakan Komunis 1926, sementara kondisi sosial, ekonomi, dan politik Banten pada masa kolonial belum banyak dikaji secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan menjelaskan mengapa Banten, meskipun secara geografis dekat dengan Batavia sebagai pusat kekuasaan kolonial, tetap mengalami ketertinggalan ekonomi, keresahan sosial, dan posisi administratif yang perifer. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber primer penelitian berasal dari arsip kolonial, laporan pemerintah, dan surat kabar sezaman, serta didukung oleh literatur sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Banten mengalami marginalisasi berlapis akibat keterbatasan akses transportasi, rendahnya kesuburan tanah, minimnya perkembangan industri, lemahnya layanan kesehatan, beban pajak, dan rendahnya minat ekonomi pemerintah kolonial. Kondisi tersebut mendorong migrasi musiman dan memperkuat ketidakpuasan sosial masyarakat. Pembahasan juga menunjukkan peran penting elite lokal, terutama kyai dan jawara, dalam membentuk sentimen anti-kolonial dan tradisi perlawanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Banten bukan sekadar wilayah

PENDAHULUAN

Historiografi Banten selama ini terfokus pada masa Kesultanan Banten. Abad ke-16 sampai dengan abad ke-17 menjadi daya tarik tersendiri bagi penulisan sejarah daerah oleh sejarawan-sejarawan Banten. Sejarawan asing seperti (Claude Guillot, 1990) yang menuliskan kondisi masyarakat Banten masa kesultanan. Ada pula sejarawan Indonesia seperti (Halwany Michrob & Chudari, 1993) serta (Nina Lubis, 2004) yang banyak menuliskan sejarah Banten pada masa kesultanan. Periode kesultanan ini memberikan ingatan dan romantisme sejarah yang mendalam bagi masyarakat Banten. Hingga pada suatu titik seperti ada yang terlewatkan antara periode kesultanan dengan periode setelah kemerdekaan.

Kajian mendalam mengenai daerah Banten di luar masa kesultanan masih sedikit. Adapun penelitian Sartono Kartodirdjo, (1984) mengenai pemberontakan petani pada 1888 memicu penulisan-penulisan sejarah Banten pada masa kolonial. Penelitian ini juga menjadi pemicu tersendiri bagi sejarawan lain untuk menuliskan sejarah kewilayahan pada masa kolonial di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Karya penting lainnya mengenai sejarah Banten yaitu dari (Michael C. Williams, 2003) tentang pemberontakan Partai Komunis Indonesia di wilayah Banten pada 1926. Kemudian, karya yang patut dicermati dari (Michael C. Williams, 2003) mengenai hubungan antara agama, komunisme, dan kecenderungan memberontak penduduk Banten pada awal abad ke-20.

Namun begitu, terdapat periode yang terlewat begitu saja dalam historiografi daerah Banten. Periode setelah pemberontakan PKI tahun 1926 sampai dengan periode kemerdekaan seperti menghilang dalam buku dan kajian sejarah. Lubang ini sedikit diantaranya diisi oleh penelitian Michael C. Williams dalam bukunya, *Banten, Religion, Revolt and Communism*. Dalam buku ini, Williams memaparkan hubungan antara pemberontakan PKI tahun 1926 dengan revolusi sosial di Banten pada 1945. Periode antara 1926 sampai 1945 sebenarnya menarik untuk diteliti, karena masa itu berada di antara dua kerusuhan besar di Banten, yaitu pemberontakan komunis 1926 dan revolusi sosial pada 1945. Karakter penduduk Banten yang dikenal suka memberontak menyisakan pertanyaan mengenai “ketenangan” yang ada selama periode tersebut. Karakter masyarakat Banten yang suka memberontak dapat dilihat dari banyaknya pemberontakan yang terjadi selama masa kekuasaan Belanda di sana. Tahun 1820, 1822, 1825, 1827, 1845, 1850, 1888, dan 1926 menandai pemberontakan utama yang terjadi di wilayah Banten.

Penelitian terdahulu yang relevan telah memberikan dasar penting bagi pembacaan sejarah Banten kolonial, terutama melalui karya Sartono Kartodirdjo tentang Pemberontakan Petani Banten 1888 dan Michael C. Williams tentang hubungan agama, komunisme, dan pemberontakan 1926 di Banten. Karya Kartodirdjo tentang *The Peasants' Revolt of Banten in 1888* dikenal sebagai kajian klasik mengenai gerakan sosial petani di Indonesia dan masih banyak dirujuk dalam kajian sejarah sosial kolonial. Sementara itu, kajian Williams menempatkan Pemberontakan Komunis 1926 di Banten sebagai peristiwa penting yang memperlihatkan pertemuan antara jaringan agama, elite lokal, perantau, dan organisasi politik modern. Selain itu, kajian Helmy Faizi Bahrul Ulumi mengenai unsur magis dalam pemberontakan 1926 menunjukkan bahwa aspek kultural dan religius dalam perlawanan

Banten masih menjadi tema yang relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam historiografi kontemporer . Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih banyak menyoroti momen-momen pemberontakan besar, bukan kondisi sosial-ekonomi dan politik sehari-hari yang membentuk latar belakang marginalisasi Banten pada awal abad ke-20.

Kesenjangan penelitian yang dapat ditegaskan dari naskah ini terletak pada kurangnya kajian yang secara khusus menjelaskan Banten sebagai wilayah pinggiran yang mengalami marginalisasi berlapis pada periode awal abad ke-20. Penelitian terdahulu cenderung menempatkan Banten sebagai wilayah pemberontakan, fanatisme agama, atau basis resistensi politik, tetapi belum banyak menguraikan secara terpadu bagaimana keterisolasian geografis, rendahnya daya tarik ekonomi, keterbatasan infrastruktur, kemiskinan petani, migrasi musiman, lemahnya layanan kesehatan, serta hubungan antagonistik dengan pemerintah kolonial membentuk struktur sosial Banten secara lebih luas. Naskah ini memperlihatkan bahwa marginalisasi Banten tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor, melainkan melalui hubungan antara kondisi ekologis, kebijakan kolonial, keterbatasan ekonomi pertanian, dan dominasi elite lokal seperti kyai, jawara, serta bangsawan desa . Dengan demikian, celah akademik utama penelitian ini adalah kebutuhan untuk membaca Banten bukan semata sebagai daerah pemberontak, melainkan sebagai wilayah yang secara struktural dipinggirkan meskipun berada dekat dengan pusat pemerintahan kolonial.

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena sejarah Banten awal abad ke-20 dapat menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana ketimpangan wilayah dibentuk secara historis. Dalam naskah dijelaskan bahwa Banten memiliki posisi geografis yang strategis karena berada di ujung barat Pulau Jawa dan dekat dengan Batavia, tetapi akses transportasi, industri, perkebunan komersial, serta investasi kolonial tidak berkembang sebagaimana wilayah lain di Jawa . Fakta tersebut penting karena menunjukkan bahwa kedekatan spasial dengan pusat kekuasaan tidak selalu menghasilkan pemerataan pembangunan. Dalam konteks historiografi Indonesia, kajian semacam ini dapat memperkaya pemahaman tentang kolonialisme sebagai sistem yang menghasilkan hierarki ruang: ada wilayah yang diintegrasikan karena menguntungkan secara ekonomi, dan ada wilayah yang dibiarkan tertinggal karena dianggap kurang produktif. Oleh sebab itu, penelitian tentang Keresidenan Banten awal abad ke-20 mendesak dilakukan agar dinamika ketertinggalan wilayah, resistensi sosial, dan relasi kuasa kolonial dapat dibaca secara lebih kritis.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menempatkan Banten sebagai “pinggiran yang terpinggirkan” melalui analisis yang tidak hanya berfokus pada peristiwa pemberontakan, tetapi juga pada kondisi geografis, ekonomi, demografi, struktur elite pedesaan, migrasi musiman, dan praktik pengamanan kolonial. Pendekatan ini memberi perspektif yang lebih menyeluruh karena melihat perlawanan Banten bukan sebagai karakter bawaan masyarakat, melainkan sebagai hasil dari pengalaman historis yang panjang berupa tekanan pajak, kemiskinan, keterbatasan akses, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah kolonial. Naskah ini juga memiliki nilai kebaruan karena menjembatani ruang kosong antara masa kejayaan Kesultanan Banten, Pemberontakan Petani 1888, Pemberontakan Komunis 1926, dan Revolusi Sosial 1945. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memperluas historiografi Banten dari narasi romantik kesultanan dan narasi konflik terbuka menuju kajian struktur sosial-ekonomi yang membentuk kehidupan masyarakat Banten pada masa kolonial.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan situasi Keresidenan Banten pada awal abad ke-20 sebagai wilayah yang mengalami marginalisasi struktural dalam sistem kolonial Hindia Belanda. Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan menguraikan bagaimana kondisi geografis yang relatif terisolasi, keterbatasan infrastruktur, lemahnya pengembangan ekonomi, dominasi sektor pertanian, rendahnya minat investasi kolonial, serta kuatnya elite lokal berperan dalam membentuk karakter sosial dan politik masyarakat Banten. Penelitian ini juga bertujuan memahami mengapa Banten, meskipun dekat dengan Batavia, tetap tidak berkembang secara ekonomi dan tetap dipersepsikan sebagai wilayah yang sulit dikendalikan oleh pemerintah kolonial. Dengan membaca arsip, laporan pemerintah, surat kabar sezaman, dan literatur historiografi, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan keterkaitan antara marginalisasi ekonomi dan munculnya sikap antipati terhadap otoritas kolonial.

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari sisi teoretis, historiografis, dan sosial. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian sejarah sosial kolonial dengan menunjukkan bahwa marginalisasi wilayah dapat berlangsung melalui kombinasi antara pengabaian ekonomi, keterbatasan ekologis, kebijakan administratif, dan konstruksi stereotip terhadap penduduk lokal. Secara historiografis, penelitian ini memberi kontribusi terhadap penulisan sejarah Banten dengan mengisi kekosongan kajian mengenai periode awal abad ke-20, terutama masa antara pemberontakan besar dan perubahan politik menjelang kemerdekaan. Secara sosial, penelitian ini membantu pembaca memahami bahwa ketertinggalan suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari proses historis yang panjang, termasuk cara negara kolonial mengatur, mengabaikan, dan memaknai daerah tertentu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting bagi pengembangan historiografi Banten, tetapi juga bagi pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara kekuasaan, ruang, marginalisasi, dan resistensi dalam sejarah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode ini terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi (Gottschalk, 2008). Metode ini dimulai dengan pengumpulan data atau heuristik. Sumber primer yang digunakan terdapat di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan di juga di Kantor Arsip Daerah Banten. Selain itu, sumber yang berasal dari artikel-artikel koran sezaman yang didapat di Perpustakaan Nasional dan juga koran digital di situs delpher yang disediakan secara daring oleh KITLV. Sumber-sumber yang diperoleh dari tahapan heuristik selanjutnya melalui tahap kritik sejarah untuk mengetahui kredibilitasnya sebagai sumber. Adapun kritik merupakan pengujian terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh. Pertama dengan kritik ekstern untuk menentukan keaslian dokumen, dan kedua kritik intern untuk menentukan kebenaran isi data. Pada tahap ini penulis menggabungkan dan memeriksa silang sumber yang satu dengan sumber lainnya. Sumber dalam penelitian ini banyak menggunakan laporan pemerintah dan artikel surat kabar sezaman. Sumber-sumber ini banyak yang memiliki pandangan negatif terhadap perlawanan penduduk Banten. Oleh karena itu harus ada pemilihan data yang hati-hati karena adanya bias yang dihasilkan dari pandangan pemerintah terhadap kehidupan penduduk Banten. Oleh karena itu, harus ada pengolahan data dan objektivitas analisa yang dibutuhkan untuk memilah data yang akan digunakan (Kartodirdjo, 1993).

Tahap yang ketiga dari metode sejarah adalah interpretasi. Penulis memberikan

penafsiran terhadap fakta yang ditemukan dalam sumber-sumber yang didapat. Interpretasi dilakukan dengan menganalisa data dan informasi yang telah melewati proses kritik. Penafsiran data yang dihasilkan dari sumber laporan pemerintah dan artikel surat kabar ini juga dibutuhkan untuk mengklarifikasi fakta-fakta yang ada satu sama lain. Tahap yang terakhir dalam penulisan ini adalah historiografi atau penulisan sejarah. Fakta-fakta sejarah yang ditemukan diseleksi, disusun, diberi tekanan, dan ditempatkan dalam urutan kronologis dan sistematis (Kartodirdjo, 1993).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis

Keresidenan Banten adalah wilayah paling barat di Pulau Jawa, yang melingkupi wilayah seluas 7.913 km². Wilayahnya dikelilingi oleh laut di tiga sisi, di utara oleh Laut Jawa, sebelah barat terdapat Selat Sunda, sebelah selatan oleh Samudera Hindia, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Keresidenan Batavia, Buitenzorg dan Priangan (Bedding, 1925). Sampai awal abad ke-20, satu-satunya jalur komunikasi menuju wilayah ini harus melalui jalan pesisir utara dari Batavia melalui Tangerang dan kemudian ke Serang, yang jaraknya 90 km. Baru kemudian pada 1925 jalan kedua ke wilayah ini dibuat, dari Buitenzorg melalui Jasinga ke Rangkasbitung. Selain itu, untuk mencapai Banten dapat melalui pelabuhan-pelabuhan kecil, yaitu Pelabuhan Banten, Pontang, Tirtayasa, dan yang terpenting adalah Anyer (Williams, 1990; Kartodirdjo, 1984). Terdapat jalur kereta api yang dibangun pada 1900 dari Batavia ke Anyer. Jalur lainnya dibangun pada 1906 dari Batavia ke Labuan melewati Rangkasbitung. Namun demikian, sampai dengan tahun 1920-an, daerah Banten masih relatif terisolir, karena jalur transportasi ke daerah lainnya kurang baik (Bedding, 1925; Williams, 1990). Meski termasuk daerah pinggiran ibukota, di sini nampak bahwa proksimitas terhadap pusat kekuasaan tidak berarti kemudahan akses ke wilayah Banten.



Peta 1. Keresidenan Banten dengan perbatasan antar kabupaten

Sejak pembentukan Keresidenan Banten pada 1925, Serang telah menjadi ibukota administratif dan menjadi tempat kedudukan Residen. Kota ini menjadi satu-satunya di Banten pada 1930 yang populasinya mencapai 10.000 jiwa. Selain Serang, ada empat kota lain di Banten, yaitu Pandeglang, Rangkasbitung (keduanya tempat kedudukan bupati dan pejabat senior pribumi), Cilegon, dan Labuan. Di utara Serang terdapat reruntuhan dari kota tua Banten, ibu kota dari kesultanan terdahulu. Masjid dan fondasi benteng menjadi satu-satunya sisa dari salah satu pusat perdagangan Islam yang terkenal di Asia Tenggara pada abad ke-17 (Untoro, 2006; Williams, 1990).

Bagian utara Banten terdiri dari dataran rendah pesisir, mencakup bagian selatan Kabupaten Serang menuju daerah berbukit di Kawedanaan Baros dan Ciomas. Sementara itu, Pandeglang dan Rangkasbitung, dua kota utama dan ibu kota kedua kabupaten, bersama dengan Serang membentuk segitiga yang terpisah tidak lebih dari lima puluh kilometer. Wilayah selatan Banten sebagian besar terpencil, bergunung-gunung dan sangat jarang penduduknya. Area di dataran rendah pesisir utara didiami oleh etnis Jawa, sedangkan di area selatan didiami oleh etnis Sunda yang sering disebut sebagai orang gunung (penduduk gunung). Kira-kira sepertiga penduduk Banten berbahasa Jawa dan dua pertiganya berbahasa Sunda. Meskipun begitu, tidak ada dalam catatan sejarah mengenai perselisihan antara dua kelompok bahasa ini, karena identitas regional sebagai orang Banten menjadi faktor yang lebih dominan (Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1933; Williams, 1990).

Dari utara ke selatan, wilayah ini dapat dibagi secara geografis menjadi empat zona, yaitu wilayah pesisir yang digunakan sebagai lahan padi irigasi (pasawahan), daerah dengan lahan pertanian kering (pategalan), zona pegunungan yang subur (pagunungan), dan daerah selatan (pakidulan). Kartodirdjo Kartodirdjo, (1984) membagi daerah Banten menjadi dua daerah geografis, yaitu daerah utara yang pada akhir abad ke-19 tanahnya sudah digarap dan populasinya padat; serta daerah selatan yang terdiri dari pegunungan dengan kepadatan penduduk rendah. Sawah di daerah pesisir berada di Kawedanaan Pontang dan Ciruas serta sebagian utara dari Kawedanaan Serang dan Cilegon. Semuanya berada di Kabupaten Serang. Area ini memiliki karakteristik irigasi yang buruk, insiden kegagalan panen yang relatif tinggi dan hampir seluruh tanamannya terdiri dari padi. Daerah pategalan melingkupi bagian selatan dari Kabupaten Serang dan sebagian kecil dari wilayah utara Kabupaten Pandeglang. Di daerah ini, padi dan tanaman sekunder lain dapat ditanam. Wilayah pagunungan melingkupi sebagian besar wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kawedanaan Ciomas. Daerah ini merupakan wilayah subur, dan sawah terbaik yang dapat ditemukan di Keresidenan Banten. Wilayah pakidulan—kawedanaan selatan—melingkupi semua wilayah Kabupaten Lebak dan Kawedanaan Cibaliung Kabupaten Pandeglang. Wilayah ini ditandai dengan penanaman padi secara peladangan (Williams, 1990).

Kondisi Sosial Ekonomi

Ekonomi pertanian

Banten pada awal abad ke-20 sebagian besar berbentuk masyarakat pedesaan. Perekonomian Banten terutama sekali bersifat agraris. Penduduk di daerah pedesaan secara umum adalah petani dan penanam padi. Meskipun demikian, terdapat sejumlah besar kelompok penduduk desa yang bekerja sebagai pedagang, nelayan, tukang, atau sebagai pengusaha industri kecil. Ada juga kategori petani yang melakukan berbagai usaha dan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan tambahan. Mereka melakukan pekerjaan-

pekerjaan itu sebagai sambilan selama tidak ada pekerjaan di sawah atau ladang. Ada juga yang mengembangkan industri-industri tradisional seperti kulit atau pandai besi (Kartodirdjo, 1984; ANRI, 1976).

Industri Hindia Belanda yang terus berkembang selama paruh pertama abad ke-20, disertai dengan peran kecil Banten karena kapasitas industrinya yang kecil. Banten hanya berperan kecil dalam ekonomi Jawa yang menjadi tulang punggung perekonomian Hindia Belanda (Sitsen, 1943). Tidak ada industri besar, daerah komersial, atau pusat perkeretaapian di Banten. Oleh karenanya sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada pertanian. Sensus tahun 1930 menyebutkan bahwa sekitar 57,7 persen yang bekerja di Jawa Barat secara keseluruhan dikategorikan sebagai petani atau buruh tani. Sedangkan di Banten angkanya jauh lebih tinggi, dan yang tertinggi dari seluruh keresidenan di Jawa Barat. Untuk Kabupaten Serang sendiri, angkanya mencapai 74,9 persen, Kabupaten Pandeglang 80 persen, dan Kabupaten Lebak 88 persen (Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1933; Sitsen, 1943).

Banten memiliki ketertarikan ekonomi yang kecil bagi Belanda. Berbeda ketika masa kejayaan Kesultanan Banten ketika wilayah ini mendapat perhatian lebih, selain sebagai pusat perdagangan internasional, juga karena produksi ladanya (Untoro, 2006, hlm. 167–173). Perkembangan ekonomi dan sosial di Banten sangat berbeda dengan yang ada di wilayah Jawa lainnya. Tidak ada pengembangan komersial, pusat industri atau bahkan penanaman agrikultur. Sebagian alasan dibalik itu dikarenakan kondisi geografis dan tanah yang kurang subur. Alasan lain juga karena jalur transportasi yang belum memadai. Jalur komunikasi dan transportasi utama di Jawa, yang kemudian diintegrasikan dengan rel pada 1896, berasal dari Batavia sampai ke Anyer. Sampai dengan tahun 1900, hanya ada satu jalan utama di Banten, yaitu Jalan Raya Pos yang dibuat pada masa Daendels.

Usaha dari pemerintah kolonial untuk membangun ekonomi wilayah ini datang pada 1830 ketika Belanda memperkenalkan cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa di Jawa. Sebagian tujuannya adalah sebagai bagian dari usaha untuk membiayai administrasi Hindia Belanda dan menyediakan modal untuk pertumbuhan ekonomi. Inti dari sistem ini adalah pengampunan pajak tanah petani atau landrente, sebagai ganti penanaman tanaman milik pemerintah di seperlima lahannya, atau secara alternatif yaitu dengan bekerja selama enam puluh enam hari per tahun di perkebunan pemerintah atau proyek lainnya (Niel, 2003).

Tingkat keterlibatan petani dalam Sistem Tanam Paksa bervariasi di tiap Keresidenan. Pada 1845, persentase petani Banten yang terlibat yaitu sebesar 48 persen dengan rata-rata Keresidenan di Jawa sebesar 52 persen. Pada 1850 Banten menjadi wilayah yang paling rendah partisipasinya dengan hanya 16 persen dibandingkan rata-rata Jawa sebesar 46 persen. Tanaman utama dalam Sistem Tanam Paksa di Banten adalah kopi. Persentase lahan yang dipakai untuk penanaman selain kopi di Banten yaitu 4 persen pada 1840 (Jawa 6 persen), 7 persen pada 1845 (Jawa 6 persen), dan kurang dari 1 persen pada 1850 (Jawa 4 persen) (Williams, 1990, hlm. 5; Niel, 2003, hlm. 93, 145).

Selanjutnya pada 1870, hampir semua tanaman untuk cultuurstelsel milik pemerintah di Jawa, dengan pengecualian kopi ditarik dan periode baru dominasi Belanda di kepulauan Nusantara dimulai. Perubahan penting yang menandai periode ini adalah pergeseran yang bertahap dari penanaman paksa komoditas terhadap petani, menjadi dominasi daerah pedalaman dengan produksi pertanian. Terkait kebijakan ini, Menteri Koloni James London,

pada 1860 mengajukan pembukaan lahan liar seperti yang ada di Banten untuk modal swasta. Meski demikian, dorongan luas untuk modal swasta baru muncul setelah 1870-an.

Seperti pada *cultuurstelsel*, periode baru dalam eksploitasi Hindia Belanda hanya memiliki dampak terbatas terhadap Banten. Perubahan manajemen buruh menjadi manajemen modal menyebabkan permasalahan serius di Banten. Sampai dengan pecahnya Perang Dunia Dua, pemodal swasta Belanda menunjukkan sedikit minat di wilayah ini. Gula, yang dengan cepat mendominasi ekonomi Jawa sejak 1870 sampai dengan depresi tahun 1930-an, secara luar biasa ternyata tidak sesuai dengan kondisi penduduk Banten. Gula tumbuh di sawah yang subur dan beririgasi baik seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setelah ditinggalkan sebagai tanaman pemerintah pada 1846, gula tidak pernah ditanam kembali di Banten. Kopi yang menjadi satu-satunya tanaman yang menghasilkan keuntungan di Banten selama *cultuurstelsel*, ditarik pada 1890. Penanaman kopi ditarik karena menyebabkan pengurangan kesuburan tanah di banyak tempat. Setelah itu, kopi tidak pernah lagi ditanam dalam skala komersial. Satu-satunya komoditas yang diperkenalkan oleh pemodal Eropa yang menuai sukses di Banten adalah karet. Bagaimanapun, itu tidak terjadi sampai 1920-an dan bahkan tidak membuat berbagai dampak sosial dan ekonomi yang besar terhadap Banten (Williams, 1990, hlm. 8). Alasan ekologis menyebabkan terbatasnya perkembangan ekonomi di Banten. Ketidaksuburan tanah di Banten dapat digambarkan dengan kegagalan dari setiap usaha otoritas kolonial Belanda untuk membangun perkebunan tanaman agrikultur, atau produksi komoditas oleh petani itu sendiri.

Berbagai eksperimen dilakukan dengan dorongan pemerintah kolonial pada awal abad ke-20 dengan penanaman berbagai macam tanaman lain. Kina, teh, tembakau, dan kakao diuji coba tanam antara 1891 sampai dengan 1913. Hasilnya, bagaimanapun sangat buruk meskipun iklimnya sesuai dengan semua tanaman tersebut, kecuali tembakau karena terlalu lembab. Alasan dibalik kegagalan itu sebagian besar dikarenakan ketidaksuburan tanah di Banten. Hanya melalui karet terdapat kesuksesan. Pada 1927, terdapat dua puluh dua perkebunan karet di Banten, semuanya berada di Kabupaten Lebak. Pada tahun yang sama, sekitar 12.000 bau lahan pertanian ditanami karet. Dari kesemuanya, 11.225 bau berada di lahan perkebunan, dan semuanya milik orang Belanda dengan pengecualian satu perusahaan Britania. Hanya 775 bau yang ditanam oleh penduduk pribumi. Dari luas lahan tersebut, tidak semua lahan perkebunan karet yang berproduksi. Pada 1925-1930, hanya sekitar 7.000 bau yang berproduksi. Angka ini menurun lebih jauh pada masa depresi. Karet membutuhkan tanah yang gembur tapi tidak perlu terlalu subur dan iklim yang lembab. Lahan di Lebak sesuai dengan kriteria ini, tapi sering kali kondisinya kekurangan pemupukan yang intensif. Meski begitu, karet selalu menjadi komoditas hasil perkebunan dan tidak pernah menjadi tanaman komoditas petani seperti yang dilakukan di Sumatera Barat (Putman-Cramer, 1931, hlm. 9).

Pada akhir abad ke-19 sumber pemasukan baru mulai dikembangkan di Banten, yaitu perkebunan kelapa. Dengan cepat kelapa menjadi tanaman paling penting di Banten setelah padi. Kelapa sudah ditanam di Banten sejak masa sebelumnya, tapi hanya sebagai konsumsi lokal. Banyaknya penanaman terjadi karena adanya peningkatan permintaan kopra dan minyak kelapa di Eropa. Hal ini dibantu dengan dibukanya jalur kereta dari Batavia ke Anyer pada 1900 dan Labuan pada 1906. Sejak awal, orang-orang Cina memainkan peran penting dalam pengembangan perdagangan kelapa. Mereka sering kali menjadi pembeli kelapa dan memprosesnya menjadi minyak untuk dikirim ke Batavia. Kelapa menjadi satu-satunya

komoditas yang diproduksi secara serius oleh petani di Banten (Bedding, 1925, hlm. 44; Putman-Cramer, 1931, hlm. 29).

Disamping perkebunan, terdapat usaha pengembangan ekonomi berbasis industri kecil di Banten, akan tetapi hasilnya tidak berjalan baik. Tidak ada industri besar di wilayah ini, satu-satunya pabrik minyak kelapa di Rangkasbitung bahkan ditutup pada 1921. Meski begitu, terdapat industri-industri kecil seperti tempat pembakaran batu bata merah dan genting di mana-mana, begitu pula dengan pembakaran gamping. Terdapat juga perusahaan pembuatan genting di dekat Pandeglang yang diketuai oleh sang bupati yaitu R.T. Adipati Hasan Kartadinigrat, yang hasilnya diedarkan ke seluruh daerah Banten. Selain itu, terdapat kerajinan kain tenun di Pandeglang yang dinamakan kain poleng. Industri kecil lainnya diantaranya penempaan besi dan penenunan (ANRI, 1976, hlm. xxvi; Bedding, 1925, hlm. 48–49).

Ketertarikan terhadap potensi sumber daya alam di Banten muncul ketika ditemukannya emas di Cikotok, Kabupaten Lebak. Penelitian terhadap pertambangan di Banten Selatan dilakukan pada 1925-1929. Percobaan ini berakhir dengan kegagalan usaha pemerintah kolonial. Dalam penelitian selanjutnya, ditemukan beberapa deposit emas dan perak di batuan karang Cikotok dan Cipicung. Pada 1934 lokasi pertambangan ini dikonsesikan kepada firma Erdmann & Sielcken dan Billiton Mij. Lokasi tambang ini terbukti menguntungkan karena 60 dari 130 ton bijih tambang merupakan metal berharga (“Goud en Zilver in Bantam,” 1933; “Goud in Zoud-Bantam,” 1934).

Untuk memenuhi kebutuhan dan juga sebagai pusat perdagangan lokal, terdapat tujuh pasar lokal di Banten. Pasar yang berlokasi di Serang dan Rangkasbitung menjadi dua lokasi utama. Sedangkan pasar yang lebih kecil ada di Cilegon, Banjarsari, Pandeglang, Menes, dan Labuan. Di pasar-pasar ini orang-orang Cina sebagian besar berperan sebagai perantara dagang barang-barang dari orang Eropa dan Jepang ke pasar penduduk pribumi (Bedding, 1925, hlm. 45).

Akibat tanah di Banten yang kurang subur, usaha penanaman tanaman komersial sedikit yang membuahkan hasil. Hanya kelapa yang dapat menjadi tanaman komersial petani Banten. Selain itu, penemuan tambang emas di Cikotok sedikit di antaranya menambah potensi ekonomi Banten. Akan tetapi, petani Banten masih tidak dapat mencukupi penghasilannya sendiri lewat bertani saja. Karena daerahnya yang tidak terlalu baik serta beban ekonomi yang berat, mereka banyak yang mencari penghasilan tambahan ke berbagai tempat di luar Banten.

Migran musiman

Pada bulan-bulan tertentu, sebagian petani pergi ke Batavia atau Lampung untuk bekerja sebagai buruh upahan. Penyebab utamanya adalah beban pajak yang semakin tinggi. Pekerjaan sampingan ini juga didorong oleh kurangnya tenaga kerja di lokasi tujuan serta karena ketersediaan sarana transportasi yang memadai. Pembangunan di kota seperti Batavia menarik orang-orang dari daerah pertanian di sekitar untuk mencari pendapatan tambahan (Akhyat, 2015). Para petani Banten yang menjadi migran musiman ini pergi karena penghasilan mereka tidak mencukupi. Begitu pula dengan pilihan pekerjaan tambahan yang tersedia di daerah Banten tidak memadai. Utamanya mereka pergi pada waktu setelah panen. Ketika sedang menunggu tanah siap ditanam, para petani pergi ke Lampung dan Batavia.

Para migran ini berasal dari seluruh daerah Banten kecuali daerah terisolir di daerah selatan Lebak. Daerah yang mengirimkan migran dalam jumlah signifikan diantaranya

Cilegon, Pandeglang, Pamarayan, Ciruas, Serang, dan dalam jumlah lebih kecil, Rangkasbitung dan Pontang. Perkembangan kota Batavia dan pelabuhannya, Tanjung Priok, menjadi magnet terbesar bagi penduduk Banten. Di sana mereka bekerja sebagai kuli dan pengangkut. Penduduk Banten sering juga bekerja sebagai buruh dalam pembangunan gedung seperti mercusuar, yang banyak dibangun pada awal abad ke-20. Hasil pekerjaan mereka digunakan sebagai tabungan untuk membayar pajak kepala dan sewa tanah ketika mereka kembali ke Banten. Dalam beberapa kasus, orang Banten ini menetap di perantaraan selama beberapa tahun sebelum pulang (Akhyat, 2005; Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1933; Williams, 1990).

Selain Batavia, daerah Lampung merupakan sumber pemasukan penting bagi penduduk Banten. Lampung sendiri merupakan daerah penghasil lada. Setelah 1870, lada menjadi komoditas perdagangan internasional. Lada ditanam sebagian besar oleh petani lokal. Pada musim petik dari April sampai Agustus, perkebunan-perkebunan ini membutuhkan ribuan buruh, yang sebagian besar berasal dari para petani Banten. Pada 1910-an saja jumlah orang Banten yang menyebrang ke Lampung per tahun untuk menjadi buruh petik mencapai 30.000 orang (Williams, 1990; “De Lampongsche specerij,” 1937a; “De Lampongsche specerij,” 1937b).

Selain dari kondisi ekonomi yang lemah, Banten juga mengalami masalah penanganan kesehatan. Banten kekurangan tenaga medis untuk menangani penduduknya. Wilayah Banten selatan yang terpencil tidak dapat didatangi oleh dokter. Hanya mantri cacar yang sekali waktu datang untuk memvaksin anak-anak. Ketidakmampuan mengakses fasilitas kesehatan ini disebabkan oleh kemiskinan petani. Petani sendiri akhirnya memilih berpaling pada jampe atau ritual mistis untuk mengatasi masalah kesehatan (“De Medische Verzorging der Inl. Bevolking,” 1934). Hal ini menggambarkan ironi yang terjadi di daerah miskin di Hindia Belanda. Sistem koloni yang mendahulukan profit menyebabkan ketertinggalan pembangunan di Banten, yang selanjutnya membuat petani tetap miskin dan diabaikan dalam ketidakmampuannya mendapat kesejahteraan.

Karakter penduduk

Demografi

Jumlah penduduk di Banten berdasarkan sensus tahun 1920 sebanyak 897.742 jiwa, terdiri dari 892.370 orang pribumi, 599 orang Eropa, dan 4.773 Timur Asing. Berdasarkan sensus ini, jumlah penduduk Sunda berjumlah 599.233 jiwa, sedangkan penduduk Jawa sebanyak 219.963 jiwa. Pembagian penduduk berdasarkan distrik ada dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah penduduk Banten tahun 1920 berdasarkan kabupaten

Afdeling	Kawedanaan	Pribumi	Timur Asing	Eropa
Noord Bantam	Serang	77.009	1.206	233
	Tjiroeas	62.149	73	10
	Pontang	61.080	687	2
	Tjilegon	69.801	218	17
	Anjer	39.986	208	15
	Pamarajan	93.078	70	1
	Tjiomas	53.352	87	4
	Total	456.455	2.549	282

Pandeglang	Pandeglang	98.428	377	35
	Menes	57.357	267	40
	Tjaringin	47.581	334	1
	Tjibatioeng	27.274	44	4
	Total	230.640	1.022	80
Zuid Bantam	Rangkasbetoeng	78.785	1.121	183
	Lebak	42.054	50	48
	Paroengkoedjang	34.497	28	6
	Tjilangkahan	49.939	3	-
	Total	205.275	1.202	317

Nama daerah berdasarkan tabel diatas masih menggunakan penggunaan sebelum tahun 1925. Setelah 1925, nama Afdeeling Noord-Bantam diubah menjadi Kabupaten Serang, Pandeglang masih sama, dan Zuid-Bantam menjadi Rangkasbitung. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa populasi Banten pada 1920 sebagian besar terdiri dari penduduk pribumi.

Di Kawedanaan Menes sendiri terdapat pesantren milik Kyai Asnawi. Surat kabar berbahasa Belanda merujuk Kyai Asnawi dengan sebutan Kyai Caringin. Pengaruh kuat Kyai Asnawi yang sampai ke seluruh Banten ternyata sampai menjadikan namanya merujuk ke nama tempat, hal yang sangat jarang terjadi di Jawa sekalipun (“De Kjai van Tjaringin,” 1926; “In het Bantamsche. De Kijai van Tjaringin,” 1927). Selain itu, di daerah Menes ada juga kelompok jawara yang beroperasi disana. Daerah operasi kelompok jawara yang lain ada di Kabupaten Serang, khususnya di Anyer dan Cilegon.

Dalam sensus yang dilakukan tahun 1922, penduduk Banten meningkat menjadi sebanyak 897.472 jiwa. Dari data ini, golongan Eropa sebanyak 599 jiwa, Timur Asing 4.773 jiwa, dan pribumi 892.370 jiwa (ANRI, 1976, hlm. xxii). Kemudian, pada 1930 diadakan sensus oleh pemerintah kolonial yang melingkupi seluruh Hindia Belanda dan populasi di Banten tercatat sebanyak 1.028.628 jiwa. Populasi ini sebagian besar tinggal di daerah pedesaan (Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1933; Williams, 1990, hlm. 17).

Golongan etnis paling besar di Banten adalah etnis Sunda yang kebanyakan tinggal di bagian selatan Banten. Sementara itu, penduduk etnis Jawa banyak yang tinggal di bagian utara, terutama di daerah pesisir. Sedangkan orang-orang Baduy mendiami daerah pegunungan di selatan (Wessing, 1977, hlm. 293; Bedding, 1925, hlm. 26). Penduduk di daerah utara merupakan keturunan dari orang-orang Jawa yang datang dari Demak dan Cirebon. Dalam perjalanan waktu mereka berbaur dengan orang-orang Sunda, Bugis, Melayu, dan Lampung. Selain dari perbedaan bahasa dan adat istiadat, dalam hal ini terdapat perbedaan penampilan fisik dan watak orang Banten utara dengan orang Sunda serta orang Jawa dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di kalangan orang-orang Belanda, orang Banten Utara dikenal sebagai fanatik dalam hal agama, bersikap agresif dan bersemangat untuk memberontak. Hampir tidak ada ciri-ciri peradaban Hindu-Jawa karena penetrasi Islam sangat dalam disana. Adapun perbedaan antara penduduk Banten utara dan selatan salah satunya disebabkan oleh lingkungan alam, faktor ekologis, dan juga perbedaan yang bersifat sosio-kultural atau historis (Djajadiningrat, 1983, hlm. 87–90; Kartodirdjo, 1984, hlm. 55; Sutherland, 1973, hlm. 118). Bagian kecil dari penduduk Banten adalah orang-orang dari Timur Asing yang sebagian besar beretnis Cina.

Orang-orang Cina ini tersebar di berbagai pusat perdagangan di Banten (Bedding, 1925, hlm. 26, 45).

Populasi penduduk Banten yang hampir keseluruhan terdiri dari penduduk pribumi memperlihatkan bahwa meskipun dekat dengan pusat pemerintahan di Batavia dan Buitenzorg, ternyata tidak membawa ketertarikan terhadap orang-orang asing untuk tinggal. Hal ini dapat dihubungkan dengan kondisi alam Banten yang kurang subur dan belum berkembang dibandingkan wilayah lain di Jawa. Penduduk Banten sendiri yang secara etnik terdiri dari Sunda dan Jawa terbagi secara umum berdasarkan geografisnya. Perbedaan etnik ini pada akhirnya tidak menimbulkan perselisihan di antara keduanya.

Kelompok Elit Pedesaan

Bagi para pendatang baru, baik itu Belanda maupun pribumi, desa-desa di Banten memiliki kesan yang tidak terlalu baik. Sebagian besar daerahnya memiliki kekurangan kepadatan geografis dan sosial yang identik dengan desa lain di Jawa. Kemiskinan dan ketidaksuburan daerah ini menambah pandangan keburukan dan pengabaian penduduknya. Residen Belanda yang baru datang pada 1920 berkomentar “hampir tidak ada (di Jawa) seseorang dapat melihat kampung yang lebih berantakan, perumahan lebih kotor, dan lahan yang lebih liar.” Desa tidak memiliki batas-batas yang jelas dan seringkali terletak di ladang dibandingkan di sepanjang jalan. Di utara Banten, rumah petani terbuat dari tanah lempung yang dicampur dengan kapur, dengan atap jerami dari pohon palem; sedangkan di selatan, seperti rumah lain di Jawa, kediaman petani terbuat dari bambu (Bedding, 1925, hlm. 25; Thieme, 1920, hlm. 1; Williams, 1990, hlm. 41).

Pada awal abad ke-20 mayoritas petani Banten adalah pemilik tanah. Kepemilikan tanah di Banten dapat berlangsung lebih lama dibandingkan wilayah lainnya, karena pertambahan penduduk dapat dibarengi dengan migrasi dari sebagian penduduk yang menjadi buruh di Batavia dan Lampung (Thieme, 1920, hlm. 13). Migrasi ini memungkinkan sebagian besar penduduk untuk menjadi pemilik tanah lebih lama. Luas tanah milik petani kecil, tetapi tidak ada kelompok besar buruh tani yang tidak memiliki lahan di wilayah Banten. Pada saat yang sama, tidak ada indikasi adanya kelas pemilik lahan yang luas.

Struktur sosial desa memiliki sistem diferensiasi sosialnya sendiri tergantung wilayahnya. Di Banten terdapat tiga kelompok yang mendominasi kehidupan desa. Ketiga kelompok ini yaitu guru agama atau kyai, jawara, dan bangsawan lokal (Lombard, 1996, hlm. 145). Di Banten, pusat kehidupan desa adalah kepala desa atau jaro. Jaro dipilih oleh penduduknya sendiri dan bertanggung jawab atas administrasi desa dan melapor kepada pejabat distrik, yaitu wedana. Meski begitu, pengaruh dari kepala desa sering dilampaui oleh kelompok dominan lainnya seperti kyai atau jawara. Kepala desa bertindak sebagai representasi pemerintah pusat dan juga juru bicara kampung. Jaro harus melakukan tugas yang sulit dalam mediasi antara penguasa dan kaula. Secara keseluruhan jabatan jaro ini tidak diminati oleh penduduk desa. Sebagai instrumen pemerintah kolonial dan sebagai pengawas penarikan pajak, mereka sering menjadi objek kemarahan dan ketidakpuasan penduduk. Oleh karena itu, kepala desa sering kali tidak disukai penduduk. Kepala desa dapat memiliki wibawa dan pengaruh di Banten dengan memiliki identitas lainnya. Beberapa kepala desa ada yang menjadi jawara, lainnya merupakan keturunan bangsawan Banten. Cara lainnya yaitu kepala desa menyokong posisinya melalui aliansi dengan tokoh lokal berpengaruh seperti guru agama terkemuka atau kyai, atau dengan jawara yang penting. Jika tidak memiliki hubungan seperti

itu, kepala desa sering kali menjadi tokoh yang kurang berpengaruh di desanya sendiri ("Pertanjaan," 1930; Williams, 1990, hlm. 2).

Kelompok lain yang memiliki pengaruh di lingkungan desa adalah bangsawan lokal yang merupakan keturunan dari bangsawan Kesultanan Banten. Penyebaran praktek poligami dan pengembangan gelar telah membentuk kelas bangsawan yang besar. Kebanyakan keturunan bangsawan memiliki pengaruh utama terhadap petani biasa. Secara umum, kelompok ini dicurigai oleh otoritas kolonial Belanda, di antaranya karena kemampuan mereka dalam memimpin banyak pemberontakan petani yang banyak menandai sejarah Banten pada abad ke-19 (Kathirithamby-Wells, 1986, hlm. 265; Sutherland, 1975, hlm. 74–76). Sangat sedikit dari keturunan bangsawan ini yang kemudian memilih masuk dalam administrasi kolonial. Bagaimanapun juga di desa-desa, keturunan bangsawan memiliki pengaruh besar. Jumlah mereka ada banyak sehingga banyak juga dari keturunan keluarga terkemuka yang menetap di desa dan hidup sebagai petani biasa (Sutherland, 1975, hlm. 120–122).

Kebangsawanan Banten lama terdiri dari empat kategori. Pertama yaitu keturunan dari sultan, yang dikenal sebagai Tubagus. Gelar ini diberikan kepada anak laki-laki maupun perempuan, tapi hanya bisa diwariskan melalui garis keturunan laki-laki. Pemegang gelar ini diperlakukan dengan hormat oleh penduduk. Kedua, orang yang diberikan gelar Raden oleh sultan sebagai hadiah untuk pembantunya. Gelar ini juga diwariskan secara turun-temurun dan khususnya ada di daerah Caringin. Kategori ketiga lahir dengan gelar Mas dan disebut sebagai keturunan dari dua tokoh legendaris, Ki Djong dan Ki Djon, yang menurut tradisi, merupakan salah satu dari mualaf yang masuk Islam di Banten. Gelar lain, yang biasa ada di daerah Menes adalah Entol, yang disebut sebagai keturunan Raden Gugur Pagandjur, yang menurut tradisi merupakan pangeran Majapahit yang melarikan diri ke Banten. Cucunya, Raden Andong, berpindah keyakinan ke Islam karena dipengaruhi penguasa pertama Banten, Maulana Hasanuddin, dan membantu penyebaran agama di Banten. Orang yang memiliki gelar-gelar ini menikmati wibawa lokal yang tinggi, meskipun kehidupan mereka sering kali tidak lebih dari petani biasa atau pedagang kecil pada abad ke-19. Seiring waktu, wibawa bangsawan lokal ini hilang, terutama terhadap para petani. Mereka juga memiliki sedikit pengaruh dalam lingkaran kekuasaan kolonial. Bersama dengan kyai, mereka menjadi pusat utama dalam perlawanan terhadap kekuasaan kolonial (Williams, 1990, hlm. 51).

Penderitaan petani pada abad ke-19 dalam bentuk kerja pada pekerjaan umum (heerendiensten) dan beban pajak mengharuskan adanya pemasukan tambahan. Selain itu, usaha untuk mengatur kehidupan beragama penduduk Banten yang dikenal ortodoks dapat menjadi pemicu timbulnya kerusuhan-kerusuhan. Hal ini semakin bertambah dengan adanya pajak kepala (hoofdgeld) yang diperkenalkan pada 1882. Pajak kepala ini dikenakan tidak berdasarkan atas penghasilan atau pengeluaran dari panen. Banten yang merupakan daerah yang kurang baik dalam pertanian menyebabkan pajak ini terlalu berat. Pajak juga menjadi salah satu alasan utama dari hampir setiap pemberontakan dan kerusuhan di Banten pada abad ke-19 dan ke-20, diantaranya pada pemberontakan 1811, 1825, 1836, 1845, dan 1888, 1926, dan 1945 (Kartodirdjo, 1984, hlm. 105–107; Williams, 1990, hlm. 32).

Antipati terhadap Pemerintah Kolonial

Sampai dengan awal abad ke-20, di wilayah Banten tidak terjadi pemberontakan atau kerusuhan. Hingga pada akhir tahun 1926, di Banten dan beberapa wilayah lainnya di Hindia Belanda, Partai Komunis Indonesia melancarkan pemberontakan untuk merebut kekuasaan

pemerintahan Belanda. Pemberontakan yang gagal ini berbeda dengan pemberontakan-pemberontakan sebelumnya dalam cara pengorganisasian dan lingkup wilayah yang mencakup daerah lain di Hindia Belanda (Williams, 2003, hlm. ix-x). Pengaruh elit-elit penduduk pedesaan menjadi penggerak utama banyaknya kerusuhan. Keturunan bangsawan Kesultanan Banten dan kyai menjadi para pemimpin revolusioner yang dapat menggerakkan penduduk Banten untuk melancarkan bentuk protes yang keras terhadap pemerintahan asing Belanda (Kartodirdjo, 1984, hlm. 163). Dalam pemberontakan tahun 1926 sendiri, unsur-unsurnya ditambah dengan adanya kalangan yang memiliki pendidikan atau para perantau. Kelompok inilah yang melakukan pengorganisasian massa petani di Banten (Williams, 2003, hlm. 44).

Di samping keturunan bangsawan dan kyai, unsur penting dalam pemberontakan adalah jawara, kelompok marjinal yang dikenal akan kedekatannya pada pelanggaran hukum. Selain ditakuti, mereka juga menjadi jembatan akan perasaan protes penduduk terhadap kekuasaan asing. Pada setiap pemberontakan, kelompok jawara ini memainkan peran penting sebagai garda terdepan dalam setiap aksi kerusuhan.

Pemberontakan PKI pada 1926 memberikan kejutan terakhir bagi pemerintah kolonial selama kekuasaannya di tanah Banten. Meski begitu, pemerintah Belanda berusaha untuk mengantisipasi adanya kerusuhan-kerusuhan lainnya yang mungkin saja muncul. Akibat dari pemberontakan PKI ini, banyak pelaku-pelaku kerusuhan yang dibuang ke Boven Digul atau dipenjara. Beberapa diantaranya ada yang dihukum mati. Sampai dengan berakhirnya kekuasaan Belanda pada 1942, tidak ada lagi kerusuhan atau pemberontakan di daerah Banten. Keresahan sosial yang selalu hadir di sekitar penduduk Banten menjadi penyebab sering terjadinya kerusuhan sosial di Banten. Keresahan sosial ini dapat pula terbentuk sebagai kegiatan-kegiatan melanggar hukum selain dari bentuk pemberontakan terbuka. Aksi-aksi ini nampak seperti kejahatan biasa pada umumnya. Hanya saja dari kejahatan ini muncul motif tersembunyi yang menjadikan tujuannya menjadi anti-penguasa.

Di samping adanya kerusuhan-kerusuhan besar, kejahatan-kejahatan juga sering muncul di sekitar penduduk Banten. Kejahatan-kejahatan ini sering diasosiasikan kepada para jawara, karena kedekatannya pada dunia hitam. Meski begitu, banyak juga kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh penduduk lainnya. Kejahatan-kejahatan ini dapat dilihat dalam dua hal berdasarkan tujuannya, yaitu untuk mengganggu kekuasaan pemerintah kolonial dan murni kejahatan biasa. Penduduk lokal melihat kriminalitas ini dalam dua pandangan berdasarkan pada korbannya. Apabila korbannya adalah petani biasa, tentu ini dianggap sebagai gangguan keamanan. Sedangkan bila korbannya adalah kelompok yang tidak disenangi petani, seperti tuan tanah atau priyayi, maka akan dianggap sebagai pejuang suara-suara protes petani atas keresahan sosial yang mereka alami yang tidak dapat mereka sampaikan sendiri (Hobsbawm, 2000, hlm. 2).

Tidak kalah dengan peran kyai dan santri-santrinya di pesantren. Mereka juga membangun jaringan yang menyebarkan gagasan anti Belanda. Hal ini umumnya didasarkan atas penolakan mereka terhadap pemerintah Belanda yang berbeda agama. Dalam banyak pemberontakan, kyai beserta santrinya ini turut serta dalam pemberontakan. Alasan religius menjadi cita-cita utama gerakan kyai dan santrinya. Oleh karena itu pula, tokoh-tokoh agama di Banten banyak yang dicurigai oleh pemerintah kolonial. Potensi mereka untuk melawan sangat tinggi, ditambah dengan etos anti Belanda yang sama kuat pula.

Pemerintah kolonial juga memberikan perhatian terhadap kejahatan dan gangguan keamanan. Tindakan kriminalitas biasa dapat diartikan sebagai usaha untuk mengganggu dominasi Belanda di Banten. Kaitannya erat dengan seringnya pemberontakan dan karakter keras penduduk Banten, sehingga tidak dapat dihiraukan begitu saja. Periode antara 1926 dan 1942 yang cenderung tenang tentu memberikan kesan keberhasilan pemerintah dalam menghadapi potensi gangguan keamanan di wilayah Banten.

Gangguan keamanan di Banten ini diantaranya dilakukan oleh bandit-bandit yang sudah ada sejak masa kesultanan. Pendapat Eric J. Hobsbawm mengenai Banten sebagai daerah yang merupakan pusat permanen dari para bandit dan juga pemberontakan pada abad ke-19 menekankan agar dilakukannya penelitian lokal secara mendalam. Faktor-faktor geografis, teknologi, administrasi, sosial, dan ekonomi yang menjadi alasan kemunculan para pelanggar hukum berbeda di setiap daerah tergantung dari daerahnya. Hal ini untuk menjelaskan kenapa kebanditan menjadi endemik di beberapa daerah dan bersifat lemah di daerah lain. Ini juga berlaku dengan daerah Banten, yang juga dijelaskan dalam penelitian-penelitian terdahulu (Hobsbawm, 2000, hlm. 4–7). Peran bandit ini di Banten dilaksanakan oleh jawara.

Karakter Banten yang sulit diatur ini menjadi tantangan bagi pemerintah kolonial dalam menegakkan ketertiban. Oleh karena itu, penegakan *rust en orde* di Banten mendapat ciri khasnya sendiri, yaitu tentang bagaimana pemerintah Belanda berusaha untuk menegaskan dominasinya di Banten sejalan dengan usahanya untuk memasukkan institusi barat ke masyarakat lokal. Pendominasian ini merupakan usaha dari tradisi besar untuk mendominasi kehidupan dari tradisi kecil.

Kesulitan dalam mengatur Banten menyebabkan pemerintah kolonial khawatir akan adanya pemberontakan lain. Sebaliknya, penduduk Banten juga takut bila terjadi pemberontakan lainnya. Penduduk Banten takut akan penumpasan pemberontakan yang dilakukan pemerintah kolonial. Meski begitu, perlawanan penduduk Banten tidak hilang sama sekali. Kesulitan ekonomi dan hubungan yang rentan dengan otoritas kolonial masih menyisakan kelompok-kelompok yang tidak senang dengan keberadaan kekuasaan asing. Kelompok ini adalah kyai dan jawara. Misalnya Kyai Asnawi, yang akibat pemberontakan 1926 diasingkan keluar Banten. Dari basis pesantrennya di Menes, dia memiliki pengaruh besar sampai ke luar Banten. Begitu juga dengan kelompok jawara seperti Seniin Gede dan Haji Armana yang menjadi ancaman langsung otoritas kolonial (Meyer, 1946, hlm. 22).

KESIMPULAN

Kondisi ekonomi Banten tidak terlalu baik dibandingkan wilayah lain di Pulau Jawa, meskipun secara jarak Banten tidak jauh dari ibukota Batavia, sehingga termasuk daerah pinggiran. Sementara itu, dalam hal situasi keamanan, Banten sudah terkenal sebagai wilayah yang sering memberontak. Sentimen negatif yang tinggi terhadap pemerintah kolonial juga diperparah oleh karakter masyarakatnya yang religius dan ortodoks. Semua faktor tersebut mempertegas karakter Banten baik sebagai wilayah maupun penduduk sebagai sesuatu yang unik, baik di Pulau Jawa maupun Hindia Belanda secara keseluruhan. Hal ini nampak pada dua kelompok sosial yang menjadi poros perlawanan terhadap pemerintah kolonial, yaitu jawara dan kyai. Kedua kelompok ini memainkan peran penting dalam Pemberontakan Komunis 1926 dan Revolusi Sosial 1945. Banten mengalami marginalisasi struktural yang berlapis akibat dari keterisolasian geografis, kemiskinan sistemik, dan karakteristik penduduk yang antipatis. Oleh

karena itu, faktor-faktor tersebut mempengaruhi situasi Banten secara sosial, ekonomi dan politik menjadi tidak mengenakan meski memiliki proksimitas terhadap pusat kekuasaan, sehingga tidak muluk apabila Banten menjadi daerah pinggiran yang terpinggirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyat, A. (2015) 'The Colonial Strained in Java 1870-1930: Public Spaces Versus Public Policies', *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 9(1), pp. 161–178.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (1976). *Memori Serah Jabatan 1921-1930* (Jawa Barat). ANRI.
- Bedding, J. C. (1925). *Memorie van Overgave van den Afgetreden Resident van Bantam* [Manuskrip].
- De Kjai van Tjaringin. (1926, November 25). *Bataviaasch Nieuwsblad*.
- De Lampongsche specerij. (1937a, Desember 24). *Soerabaijasch Handelsblad*.
- De Lampongsche specerij. (1937b, Desember 30). *De Sumatra Post*.
- De Medische Verzorging der Inl. Bevolking. (1934, Maret 29). *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie*.
- Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. (1933). *Volkstelling 1930. Deel I: Inheemsche Bevolking van West-Java*. Landsdrukkerij.
- Djajadiningrat, H. (1983). *Tinjauan Kritis Tentang Sejarah Banten*. KITLV dan Djambatan.
- Gottschalk, L. (2008). *Mengerti Sejarah* (N. Notosusanto, Penerj.; 4 ed.). Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Goud en Zilver in Bantam. (1933, Juni 6). *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*.
- Goud in Zoud-Bantam. (1934, Juli 28). *De Telegraaf*.
- Guillot, C. (1990). *The Sultanate of Banten*. Gramedia Book Publishing Division.
- Hobsbawm, E. J. (2000). *Bandits*. The New Press.
- In het Bantamsche. De Kijai van Tjaringin. (1927, Januari 22). *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*.
- Kartodirdjo, S. (1984). *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya* (1 ed.). Pustaka Jaya.
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (S. Pusposaputro, Ed.; Cet. 2). Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kathirithamby-Wells, J. (1986). Royal Authority and the "Orang Kaya" in the Western Archipelago, circa 1500-1800. *Journal of Southeast Asian Studies*, 17(2), 256–267.
- Lombard, D. (1996). *Nusa Jawa: Silang Budaya; Kajian Sejarah Terpadu. Bag. 3: Jaringan Asia*. Gramedia.
- Lubis, N. H. (2004). *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara* (Cet. 1). LP3ES.
- Meyer, D. H. (1946). *Japan Wint den Oorlog: Documenten over Java*. N.V. Leiter-Nypels.
- Michrob, H., & Chudari, A. M. (1993). *Catatan Masa Lalu Banten* (Cet. 3). Saudara.
- Niel, R. van. (2003). *Sistem Tanam Paksa di Jawa*. LP3ES.
- Pertanjaan. (1930, Januari 3). *Banten Bode*.
- Putman-Cramer, F. G. (1931). *Memorie van Overgave van den Afgetreden Resident van Bantam* [Manuskrip].

- Sitsen, P. H. W. (1943). Industrial Development of the Netherlands Indies. Bulletin 2 of the Netherlands and Netherlands Indies Council of the Institute of Pacific Relation.
- Sutherland, H. (1973). Notes on Java's Regent Families: Part I. Indonesia, 16, 112. <https://doi.org/10.2307/3350649>
- Sutherland, H. (1975). The Priyayi. Indonesia, (19), 57–77.
- Thieme, W. C. (1920). Memorie van Overgave van den Afgetreden Resident van Bantam [Manuskrip].
- Untoro, H. O. (2006). Kebesaran dan Tragedi Kota Banten. Yayasan Kota Kita.
- Wessing, R. (1977). The Position of the Baduj in the Larger West Javanese Society. Man, 12(2), 293. <https://doi.org/10.2307/2800800>
- Williams, M. C. (1990). Communism, Religion, and Revolt in Banten. Ohio University Press.
- Williams, M. C. (2003). Arit dan Bulan Sabit: Pemberontakan Komunis 1926 di Banten. Syarikat.